

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa proses *collaborative governance* yang dilakukan pada pengelolaan sampah di BUMDes Murakabi Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus telah sesuai dengan lima dimensi proses *collaborative governance*, yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara. Namun pada lima dimensi tersebut masih terdapat permasalahan.

Dialog tatap muka pada proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di BUMDes Murakabi Desa Gondosari sudah berjalan dengan adanya pertemuan dan komunikasi di antara BUMDes Murakabi dengan *stakeholders* lain melalui pertemuan tatap muka, yaitu melalui sosialisasi dengan masyarakat desa, rapat laporan per 6 bulan dengan pemerintah desa, pertemuan setiap satu bulan sekali dengan pihak swasta yang menjadi anggota program pengambilan sampah, dan presentasi proposal program dengan pihak swasta. Pada pertemuan yang dilakukan terdapat negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama di antara *stakeholders* yang mengarah pada peluang-peluang adanya kondisi saling menguntungkan jika melakukan kolaborasi. Pada proses kolaborasi dalam pengelolaan sampah di BUMDes Murakabi Desa Gondosari sudah terdapat kesepakatan bersama untuk berkolaborasi di antara BUMDes Murakabi dengan *stakeholders* lain, yaitu Pemerintah Desa Gondosari,

masyarakat desa, dan pihak swasta (PT Sukun Wartono Indonesia, PT Buana Sandang Indonesia (Anak perusahaan ATW Corp.), dan PT Albisindo Timber). Namun pertemuan rutin hanya dilakukan dengan pemerintah desa dan pihak swasta, sedangkan belum ada pertemuan rutin dengan masyarakat desa sehingga masyarakat desa tidak begitu paham dengan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh BUMDes Murakabi.

Membangun kepercayaan dalam proses kolaborasi pengelolaan sampah di BUMDes Murakabi Desa Gondosari sudah dilakukan oleh BUMDes Murakabi selaku pemimpin kolaborasi. Membangun kepercayaan ini dilakukan BUMDes Murakabi dengan menunjukkan kapabilitas dan kontribusi nyata BUMDes Murakabi dalam pengelolaan sampah, seperti menunjukkan kepada masyarakat desa bahwa sampah anggota program pengambilan sampah benar-benar dijalankan, mempresentasikan kinerja dan hasil asesmen BUMDes kepada pihak swasta, dan keterbukaan informasi dari pemerintah desa dan BUMDes melalui BPD. Namun, terdapat keterbatasan informasi yang disampaikan kepada masyarakat desa. Masyarakat desa belum mengetahui keuntungan dan kerugian yang diperoleh dari program pengambilan sampah yang mereka ikuti.

Komitmen terhadap proses dalam proses kolaborasi pengelolaan sampah di BUMDes Murakabi Desa Gondosari masih belum berjalan secara maksimal. Komitmen *stakeholders* dalam proses kolaborasi ini didorong oleh adanya keterbatasan kemampuan masing-masing *stakeholders* yang membentuk rasa saling ketergantungan karena pelaksanaan pengelolaan sampah membutuhkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Akan tetapi, dalam menjalankan

perannya dalam kolaborasi masyarakat desa belum berkomitmen dalam mengelola sampahnya sendiri di rumah dan masih ada yang membuang sampah sembarangan. Selain itu, belum semua masyarakat desa menjadi anggota program pengambilan sampah. Komitmen dari pemerintah desa juga baru didukung oleh kepala desa karena perangkat desa yang lain belum peduli pada pengelolaan sampah.

Pemahaman bersama dalam proses kolaborasi pengelolaan sampah di BUMDes Murakabi Desa Gondosari sudah berjalan dengan baik. Terdapat tujuan bersama untuk menangani sampah desa yang sudah dikoordinasikan dengan setiap *stakeholders* sehingga tujuan tersebut sudah dipahami oleh masing-masing *stakeholders*. Proses kolaborasi pengelolaan sampah di BUMDes Murakabi Desa Gondosari sudah menghasilkan keuntungan bagi setiap *stakeholders* yang terlibat. Masyarakat desa dan pihak swasta mendapat keuntungan dengan terkelolanya sampah mereka dengan baik melalui program pengambilan sampah. Pemerintah desa terbantu dengan adanya pengelolaan sampah sehingga lingkungan desa menjadi lebih bersih, serta desa mendapatkan penghargaan gubernur Desa Mandiri Sampah pada tahun 2023 dan 2024. Dari BUMDes Murakabi sendiri mendapatkan bantuan sumber daya dari *stakeholders* lain untuk menjalankan dan mengembangkan pengelolaan sampah. Tujuan bersama untuk menangani sampah desa juga sudah mulai tercapai dengan 70 persen sampah sudah dikelola di BUMDes Murakabi. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa volume sampah desa masih besar sehingga

mesin dan tenaga yang dimiliki belum mampu mengolah sampah tersebut dalam satu hari.

Terdapat faktor yang mendukung dan menghambat proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di BUMDes Murakabi Desa Gondosari. Faktor pendukung proses kolaborasi ini adalah kondisi awal dan kepemimpinan fasilitatif. Ketidakseimbangan sumber daya pada kondisi awal menjadi faktor pendukung pada dimensi dialog tatap muka dan komitmen terhadap proses pada proses kolaborasi pengelolaan sampah ini. Ketidakseimbangan sumber daya yang dimiliki masing-masing *stakeholders* untuk mengelola sampah desa telah membentuk hubungan kolaborasi yang berkelanjutan di antara *stakeholders* tersebut. Pada hubungan kolaborasi ini setiap *stakeholders* saling mengisi ketidakseimbangan sumber daya yang ada sehingga muncul rasa saling ketergantungan memunculkan pertemuan dan komitmen untuk saling berkolaborasi di antara BUMDes Murakabi, Pemerintah Desa Gondosari, Masyarakat Desa Gondosari, dan pihak swasta (PT Sukun Wartono Indonesia, PT Albesindo Timber, dan PT Buana Sandang Indonesia).

Faktor pendukung kolaborasi dalam pengelolaan sampah yang kedua adalah kepemimpinan fasilitatif. BUMDes Murakabi sebagai pemimpin kolaborasi sudah mampu melibatkan dan memberdayakan *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan sampah, serta sudah menyediakan fasilitas yang mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah. Kemudian sudah terdapat *monitoring* terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah melalui pengawasan dari Pemerintah Desa Gondosari dan masyarakat desa. Kepemimpinan fasilitatif

yang mampu memberdayakan *stakeholders* dan menyediakan fasilitas pengelolaan sampah yang didukung pengawasan dalam pelaksanaan kolaborasi telah mendukung berjalannya proses kolaborasi, terutama pada dimensi membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan hasil sementara. Walaupun demikian, BUMDes Murakabi belum memberdayakan perangkat desa secara maksimal dalam kolaborasi pengelolaan sampah dan BUMDes belum memfasilitasi pertemuan rutin dengan masyarakat desa telah menghambat proses kolaborasi di antara *stakeholders* tersebut.

Adapun faktor penghambat dalam proses kolaborasi pengelolaan sampah di BUMDes Murakabi Desa Gondosari, yaitu desain kelembagaan. Pada kolaborasi dengan masyarakat desa belum terdapat aturan dasar yang jelas dalam kolaborasi antara BUMDes Murakabi dengan masyarakat Desa Gondosari. Belum adanya peraturan yang mewajibkan mengikuti program pengambilan sampah, belum ada SOP yang jelas bagi masyarakat anggota program pengambilan sampah, dan belum ada peraturan khusus dari pemerintah desa terkait pengelolaan sampah desa dan sanksi bagi yang melanggar telah menjadi faktor penghambat pada dimensi pemahaman bersama, komitmen terhadap proses, dan hasil sementara.

4.2.Saran

- 4.2.1. Proses *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah di Badan Usaha Milik Desa Murakabi Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus

Berdasarkan kesimpulan tersebut terlihat bahwa proses *collaborative governance* yang dilakukan pada pengelolaan sampah di BUMDes Murakabi Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus belum berjalan maksimal pada kelima dimensi. Saran yang dapat diberikan peneliti pada dimensi dialog tatap muka adalah melakukan pertemuan rutin di antara BUMDes Murakabi dengan masyarakat Desa Gondosari yang membahas terkait pengelolaan sampah dan hubungan kolaborasi di antara kedua pihak.

Pada dimensi membangun kepercayaan adalah pemberian keterbukaan informasi terkait keuntungan dan kerugian yang diperoleh dari program pengelolaan sampah kepada masyarakat desa melalui pertemuan rutin karena kepercayaan masyarakat desa turut mempengaruhi komitmen mereka dalam berkolaborasi.

Pada dimensi komitmen terhadap proses terdapat permasalahan bahwa belum semua masyarakat desa berkolaborasi menjadi anggota program pengambilan sampah. saran yang dapat peneliti berikan adalah dengan meningkatkan kapasitas mesin pengelola sampah dan membuat peraturan yang mewajibkan masyarakat desa untuk ikut program pengambilan sampah.

Dalam dimensi komitmen terhadap proses dan pemahaman bersama terdapat permasalahan yang sama, yaitu masyarakat desa belum mengelola sampah sendiri sebelum diambil oleh BUMDes, masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan, dan perangkat desa yang belum peduli pada pengelolaan sampah. Adapun saran yang dapat peneliti berikan, yaitu BUMDes Murakabi membuat SOP program pengambilan sampah yang berisi anjuran dan cara untuk memilah sampah

kepada masyarakat desa yang menjadi anggota program. Untuk mengatasi masyarakat desa yang masih membuang sampah sembarang, membuat peraturan desa tentang pengelolaan sampah desa yang di dalamnya terdapat sanksi terhadap hal tersebut dan pemerintah desa dapat menyediakan tempat sampah di sekitar desa. Sedangkan kepada perangkat desa, BUMDes Murakabi dan kepala desa dapat melakukan sosialisasi yang dapat mendorong pemahaman mereka terkait pentingnya pengelolaan sampah sehingga mereka dapat lebih aktif dalam berkolaborasi.

Pada dimensi hasil sementara terdapat kendala pengelolaan sampah dalam satu hari karena terdapat ketidakseimbangan antar volume sampah yang dihasilkan dengan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang dimiliki BUMDes sehingga peneliti menyarankan pemerintah desa untuk membuat peraturan desa tentang pengelolaan sampah desa yang di dalamnya ada anjuran untuk mengurangi penggunaan barang sekali pakai dan melakukan pemilahan sampah yang disertai edukasi pengenalan barang ramah lingkungan dan cara memilah sampah kepada masyarakat desa. Hal ini diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan oleh Desa.